

Efektivitas Penetapan Retribusi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Provinsi Sulawesi Utara

Ivan R. Kasenda¹, Wilson Bogar², Jetty E.H. Mokat³

^{1,2,3}Universitas Negeri Manado, Indonesia

E-mail: ivankasenda25@gmail.com¹

Article History:

Received: 01 Juni 2025

Revised: 12 Juni 2025

Accepted: 17 Juni 2025

Keywords: *Retribusi Daerah, RPTKA, Efektivitas, PAD, Tenaga Kerja Asing*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penetapan retribusi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama: perencanaan dan pelaksanaan penetapan retribusi RPTKA serta faktor penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka regulasi dan struktur kelembagaan yang memadai, efektivitas penetapan retribusi belum tercapai secara optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidakakuratan perencanaan biaya, kurangnya validasi data tenaga kerja asing, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam proses implementasi. Ketepatan biaya dan ketepatan sasaran, dua indikator efektivitas dari teori Makmur, belum dapat diwujudkan secara maksimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan database TKA, integrasi antarinstitusi, serta pelatihan teknis bagi aparaturnya pelaksana retribusi. Studi ini berkontribusi dalam penguatan tata kelola retribusi daerah berbasis kebijakan yang responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan global dan lokal.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan retribusi daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya bagi provinsi dengan potensi tenaga kerja asing yang tinggi seperti Sulawesi Utara. Salah satu bentuk retribusi tersebut adalah Retribusi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), yang didesain untuk memberikan kontribusi keuangan daerah sekaligus mengontrol keberadaan tenaga kerja asing. Dalam konteks ini, efektivitas penetapan retribusi menjadi krusial, mengingat peranannya dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mendorong pembangunan berbasis sumber daya lokal (LAUT et al., 2021; Mulyati & Surtiani, 2023; Ruan & Zhao, 2022).

Perubahan regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah membawa implikasi besar terhadap mekanisme pengelolaan tenaga kerja asing di Indonesia. Regulasi tersebut menyederhanakan prosedur perizinan dengan hanya mewajibkan

RPTKA, menggantikan berbagai perizinan sebelumnya seperti IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing). Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk cepat beradaptasi dengan sistem baru, termasuk dalam hal penetapan dan pemungutan retribusinya (Bettarelli et al., 2024; Feld et al., 2024a; Tang & Beer, 2022).

Secara filosofis, retribusi RPTKA tidak hanya memiliki fungsi fiskal, tetapi juga fungsi ekonomi dan sosial. Retribusi ini diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan pasar kerja antara tenaga kerja lokal dan asing, serta menjadi instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penerimaan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan retribusi RPTKA tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus berbasis pada perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat sasaran (Bogar, 2018; Rahmatul Putra et al., 2023; Wu & Dong, 2022).

Namun, dalam praktiknya, penetapan retribusi RPTKA di Provinsi Sulawesi Utara masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan seperti rendahnya akurasi data tenaga kerja asing, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan utama. Hal ini berdampak pada kurangnya ketepatan dalam perhitungan target PAD dan pada akhirnya memengaruhi efektivitas kebijakan yang diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah.

Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini merujuk pada teori efektivitas, yang menekankan pentingnya ketepatan dalam penentuan biaya dan sasaran kebijakan publik. Selain itu, teori pasar tenaga kerja seperti yang dikemukakan Todaro dan Suparmoko menyoroti perlunya intervensi pemerintah untuk menyeimbangkan dinamika permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam konteks globalisasi. Kombinasi pendekatan teori ini menjadi dasar dalam menganalisis kebijakan retribusi RPTKA (Mokat et al., 2022; Sandy & Inayati, 2022; Trusova, 2019).

Secara empiris, penerapan retribusi RPTKA di Sulawesi Utara belum sepenuhnya optimal. Penurunan jumlah tenaga kerja asing akibat alih keterampilan kepada tenaga kerja lokal tidak diikuti oleh penyesuaian target retribusi, sehingga terjadi ketimpangan antara target dan realisasi PAD. Hal ini menimbulkan tekanan fiskal bagi daerah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pembiayaan program-program pembangunan prioritas, seperti infrastruktur dan bantuan sosial (Nguyen-Hoang & Zhang, 2022; Rantung et al., 2024; Wen et al., 2023).

Penelitian ini menjadi relevan karena menyasar langsung pada titik kritis dari pengelolaan pendapatan daerah, yakni efektivitas kebijakan. Kajian ini tidak hanya membahas dimensi fiskal dari retribusi, tetapi juga menganalisis tata kelola dan proses implementasinya dari sudut pandang administrasi publik. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) sejauh mana efektivitas penetapan retribusi RPTKA di Provinsi Sulawesi Utara? dan (2) apa saja faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas tersebut? Temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola retribusi daerah, khususnya dalam konteks ketenagakerjaan lintas negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas penetapan retribusi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Provinsi Sulawesi Utara. Metode ini dipilih karena

sesuai untuk menggali informasi secara menyeluruh mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, serta kendala dalam pengelolaan retribusi daerah yang bersifat kompleks dan kontekstual (Devadason, 2021a; Oyarzo & Paredes, 2019; Pavlov et al., 2024a).

Lokasi penelitian difokuskan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan dan mengelola retribusi RPTKA. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa institusi tersebut merupakan aktor utama dalam implementasi kebijakan terkait tenaga kerja asing di tingkat daerah. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yakni: proses perencanaan dan pelaksanaan penetapan retribusi serta identifikasi faktor-faktor penghambat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti kepala bidang, pengantar kerja ahli madya, dan operator pengelola data TKA. Selain itu, observasi langsung terhadap aktivitas dan dokumen internal digunakan untuk memperkuat validitas data. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi resmi yang relevan, seperti laporan Dinas Tenaga Kerja dan laman resmi TKA-Daerah Kemnaker.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi non-partisipatif, wawancara mendalam (in-depth interview), dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan penetapan target retribusi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang kaya dan kontekstual. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi yang tidak dapat diperoleh secara langsung dari wawancara atau observasi.

Proses analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri atas tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi penting dan relevan dari hasil wawancara dan observasi. Data yang telah diringkas kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang mendukung interpretasi temuan. Tahapan terakhir adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian, guna menjamin keakuratan interpretasi data (Couture et al., 2019; Gould-Yakovleva & Liu, 2024; Ndawo, 2022).

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan empat kriteria dari Lincoln dan Guba, yakni: (1) credibility melalui triangulasi data dan member check; (2) transferability dengan memberikan deskripsi kontekstual yang rinci; (3) dependability melalui audit trail; dan (4) confirmability untuk menjamin objektivitas data. Dengan pendekatan dan teknik tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menjadi dasar pertimbangan kebijakan yang kuat di tingkat daerah (Bahasoan et al., 2019; Howley et al., 2024, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Perencanaan Penetapan Retribusi RPTKA

Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses penetapan retribusi daerah. Dalam konteks RPTKA di Provinsi Sulawesi Utara, perencanaan dilakukan melalui penyusunan kertas kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang memuat estimasi jumlah tenaga kerja asing serta potensi penerimaan daerah. Namun, proses perencanaan ini belum sepenuhnya akurat karena masih bergantung pada data eksternal dari situs TKA-Daerah yang tidak selalu mutakhir dan valid.

Dari perspektif efektivitas pada penelitian lain, indikator ketepatan perhitungan biaya belum terpenuhi. Ketidaksesuaian data TKA menyebabkan estimasi penerimaan retribusi

seringkali meleset dari target. Hal ini berpengaruh terhadap asumsi fiskal yang digunakan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD, sehingga dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara perencanaan dan realisasi anggaran (Ahn et al., 2022; Chronopoulos et al., 2019).

Kurangnya koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Bapenda dalam menyelaraskan asumsi data juga menjadi faktor yang menghambat. Idealnya, perencanaan target retribusi harus melibatkan sistem validasi silang antarinstansi untuk menjamin keakuratan data yang digunakan dalam penetapan target. Namun dalam praktiknya, masing-masing instansi bekerja dalam silo, tanpa mekanisme evaluasi bersama.

Ketiadaan basis data TKA yang terintegrasi dan real-time juga menghambat kemampuan perencana untuk menyusun prediksi yang tepat. Walaupun secara teknis ada akses ke database pusat, kemampuan teknis aparatur dalam mengelola data digital masih terbatas. Ketergantungan terhadap data manual dan dokumen hardcopy masih mendominasi proses administrasi di lapangan.

Sebagai konsekuensinya, ketidaktepatan dalam proses perencanaan menyebabkan target PAD dari sektor retribusi RPTKA menjadi tidak realistis. Ini bukan hanya berdampak pada potensi kehilangan penerimaan daerah, tetapi juga menghambat kredibilitas instansi pengelola dalam menyusun strategi fiskal berbasis kinerja. Maka, dibutuhkan upaya pembenahan serius dalam proses perencanaan berbasis data (Sen, 2023; Zhou et al., 2023).

Efektivitas Pelaksanaan Penetapan Retribusi

Pelaksanaan penetapan retribusi RPTKA merupakan tahapan lanjutan dari proses perencanaan yang mencakup eksekusi teknis, sosialisasi kepada perusahaan pengguna TKA, dan pemungutan retribusi. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan masih menghadapi kendala administratif dan teknis yang berdampak pada rendahnya tingkat efektivitas. Meskipun ada regulasi yang mengatur, implementasi di lapangan belum seragam dan seringkali tidak memiliki panduan teknis operasional.

Ketepatan sasaran yang menjadi salah satu indikator efektivitas belum tercapai maksimal. Sejumlah perusahaan pengguna TKA tidak terdata secara resmi atau tidak melaporkan keberadaan tenaga kerja asing kepada Dinas Tenaga Kerja. Hal ini menyebabkan potensi penerimaan retribusi tidak tertagih dan memperbesar risiko kebocoran PAD. Kondisi ini juga memperlihatkan lemahnya pengawasan dan pengendalian dari pemerintah daerah terhadap pelaku usaha (Nguyen-Hoang & Zhang, 2022; Pavlov et al., 2024b).

Aspek teknologi informasi yang seharusnya mendukung efektivitas pelaksanaan belum dimanfaatkan secara optimal. Sistem pelaporan digital yang telah tersedia tidak digunakan secara penuh karena keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam pengoperasiannya. Sebagian besar proses masih dilakukan secara manual, memperlambat waktu respons dan memperbesar peluang terjadinya kesalahan data (Devadason, 2021b; Gao & Wang, 2023).

Lebih lanjut, sistem sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaporkan penggunaan TKA juga belum berjalan secara tegas. Tidak adanya sistem penegakan hukum atau audit berkala menjadikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan retribusi menjadi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tidak hanya membutuhkan aturan, tetapi juga mekanisme pengawasan yang ketat dan konsisten.

Dari aspek sumber daya, pelaksanaan penetapan retribusi juga terkendala oleh keterbatasan jumlah pegawai dan pembagian tugas yang tidak proporsional. Kinerja pelaksana di lapangan tidak didukung oleh pelatihan yang memadai maupun pembaruan kapasitas administratif. Oleh karena itu, pelaksanaan retribusi RPTKA di Provinsi Sulawesi Utara belum

berjalan secara efektif dan efisien sesuai harapan kebijakan.

Faktor Penghambat Efektivitas Penetapan RPTKA

Faktor penghambat efektivitas penetapan retribusi RPTKA terbagi ke dalam tiga aspek utama: kelembagaan, teknis operasional, dan regulasi. Dari sisi kelembagaan, tidak adanya koordinasi antarlembaga menyebabkan informasi yang diterima oleh pelaksana tidak sinkron. Bapenda dan Disnakertrans bekerja secara terpisah tanpa forum evaluasi berkala yang menyatukan data, target, dan capaian actual (De Simone et al., 2017; Feld et al., 2024b).

Dari segi operasional, keterbatasan sumber daya manusia menjadi masalah klasik yang terus berulang. Sebagian besar tenaga kerja pengelola retribusi adalah tenaga kontrak atau honorer dengan kemampuan teknis terbatas. Ini membuat implementasi sistem digital menjadi tidak efektif. Selain itu, tingginya beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah personel juga memperlambat proses pelayanan dan verifikasi (Van Haelter et al., 2023; Xu & Dai, 2024).

Faktor regulasi juga memegang peranan penting dalam menciptakan hambatan. Perubahan dari IMTA ke RPTKA sebagaimana diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2021 belum diikuti oleh revisi peraturan daerah yang relevan. Ketidakharmonisan antara kebijakan pusat dan daerah membuat pelaksana bingung dalam menjalankan prosedur yang sesuai. Akibatnya, banyak langkah yang bersifat improvisasi dan tidak berbasis pada ketentuan hukum yang kuat.

Minimnya sosialisasi kepada pihak perusahaan juga menyebabkan tingkat kepatuhan yang rendah. Banyak perusahaan pengguna TKA tidak memahami secara detail mekanisme penetapan retribusi dan kewajiban administratif mereka. Ini menyebabkan banyaknya kasus keterlambatan pelaporan dan ketidaktercapaian target retribusi yang seharusnya masuk ke kas daerah (Danquah et al., 2023; Hogg-Graham et al., 2021).

Dalam jangka panjang, akumulasi dari berbagai hambatan ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap mekanisme pengelolaan retribusi oleh pemerintah daerah. Maka diperlukan upaya reformasi kelembagaan yang menyentuh pada sistem kerja, peningkatan kapasitas SDM, serta pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perubahan di tingkat pusat (Bansal et al., 2023; Nicolás-Agustín et al., 2022).

Strategi Peningkatan Efektivitas Penetapan RPTKA

Upaya untuk meningkatkan efektivitas penetapan retribusi RPTKA memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari membenahan sistem informasi hingga reformasi kelembagaan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membangun basis data tenaga kerja asing yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Data tersebut harus menjadi acuan tunggal dalam perencanaan target retribusi (Weißmüller et al., 2023; Yakob, 2020).

Selanjutnya, diperlukan pelatihan teknis dan manajerial bagi aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Bapenda yang terlibat langsung dalam proses ini. Peningkatan kapasitas ini mencakup pemahaman terhadap regulasi terbaru, kemampuan analisis fiskal, serta penguasaan sistem informasi berbasis digital. Penguatan kapasitas ini penting untuk meningkatkan akurasi dalam penetapan dan pelaksanaan retribusi.

Pemerintah daerah juga perlu menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang baku dan jelas untuk semua tahapan penetapan retribusi. SOP tersebut harus menjadi acuan tunggal yang digunakan oleh semua pihak yang terlibat, baik di tingkat teknis maupun strategis. Dengan adanya SOP, maka pelaksanaan di lapangan akan lebih terarah dan terhindar dari bias interpretasi (Getachew et al., 2022; Yang & Yee, 2022).

Selain itu, sistem pengawasan dan evaluasi berkala harus dibentuk untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai tujuan. Mekanisme monitoring harus dilakukan tidak hanya berdasarkan capaian target, tetapi juga berdasarkan kualitas proses dan tingkat kepatuhan dari pelaku usaha. Pemerintah daerah bisa memanfaatkan teknologi untuk membangun dashboard monitoring retribusi secara real-time.

Akhirnya, kolaborasi dengan sektor swasta harus dibangun melalui forum komunikasi berkala. Melibatkan asosiasi pengusaha dan perusahaan pengguna TKA dalam proses perencanaan akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan. Pendekatan partisipatif seperti ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola retribusi yang lebih responsif, efektif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penetapan Retribusi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Provinsi Sulawesi Utara belum mencapai tingkat optimal. Meskipun secara administratif proses perencanaan dan pelaksanaan telah dilakukan sesuai prosedur, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis yang berdampak pada rendahnya capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Aspek perencanaan masih diwarnai oleh ketidaktepatan data dan asumsi fiskal yang digunakan dalam menetapkan target retribusi. Proses penyusunan kertas kerja belum sepenuhnya berbasis data aktual yang valid dan terverifikasi, sehingga menghasilkan target yang cenderung overestimate dan sulit direalisasikan. Ketergantungan terhadap data eksternal tanpa penguatan sistem internal menyebabkan proses perencanaan menjadi kurang akurat.

Pelaksanaan penetapan retribusi juga belum efektif, terutama dalam hal ketepatan sasaran dan kemampuan pemungutan. Lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pengguna TKA menyebabkan banyak potensi retribusi yang tidak tertagih. Selain itu, keterbatasan SDM, minimnya pemanfaatan sistem informasi digital, dan belum adanya penegakan sanksi tegas turut memperlemah efektivitas pelaksanaan.

Faktor penghambat lainnya mencakup belum sinkronnya regulasi pusat dan daerah, lemahnya koordinasi antarlembaga teknis, serta belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu. Ketiadaan forum koordinasi reguler antar pemangku kepentingan membuat pelaksanaan kebijakan seringkali tidak terintegrasi dan bersifat sektoral. Hal ini menyebabkan fragmentasi kebijakan dan ketidakefisienan dalam tata kelola retribusi.

Berdasarkan temuan tersebut, dibutuhkan strategi komprehensif yang mencakup penguatan basis data tenaga kerja asing, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi sistem informasi antarinstansi. Selain itu, regulasi daerah harus segera disesuaikan dengan ketentuan nasional untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan prosedur. SOP yang baku dan sistem evaluasi berbasis kinerja juga harus segera diterapkan untuk menjamin efektivitas berkelanjutan.

Secara keseluruhan, efektivitas penetapan retribusi RPTKA di Provinsi Sulawesi Utara memerlukan reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas tata kelola yang lebih adaptif terhadap perubahan regulasi dan dinamika pasar tenaga kerja. Dengan pembenahan yang menyeluruh, retribusi RPTKA berpotensi menjadi instrumen fiskal yang tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja dan memperkuat otonomi daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Ahn, J., Kim, Y., & Lim, H. (2022). For Whom the Levy Tolls: The Case of a Macroprudential Stability Levy in South Korea. *IMF Economic Review*, 70(3), 520–559. <https://doi.org/10.1057/s41308-022-00163-x>
- Bahasoan, A. N., Anwar, C., Khaldun, R. I., & Tahawa, T. H. B. (2019). The influence of economic growth on manpower absorption in Central Sulawesi. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 343(1), 012253. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012253>
- Bansal, A., Panchal, T., Jabeen, F., Mangla, S. K., & Singh, G. (2023). A study of human resource digital transformation (HRDT): A phenomenon of innovation capability led by digital and individual factors. *Journal of Business Research*, 157, 113611. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113611>
- Bettarelli, L., Furceri, D., Pizzuto, P., & Yarveisi, K. (2024). Regional fiscal spillovers: The role of trade linkages. *Journal of International Money and Finance*, 140, 102995. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2023.102995>
- Bogar, W. (2018). The Effect of Transactional Leadership and Transformational Leadership on Employees Creativity. *Journal of International Conference Proceedings*, 1(2). <https://doi.org/10.32535/jicp.v1i2.262>
- Chronopoulos, D. K., Sobiech, A. L., & Wilson, J. O. S. (2019). The Australian bank levy: Do shareholders pay? *Finance Research Letters*, 28, 412–415. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.06.010>
- Couture, M., Orzeck, P., & Petropoulos, A. (2019). PUBLIC HEALTH AND SOCIAL SERVICES SYSTEM: THE DISENCHANTMENT OF ISOLATED SENIOR CAREGIVERS. *Innovation in Aging*, 3(Supplement_1), S387–S387. <https://doi.org/10.1093/geroni/igz038.1420>
- Danquah, J. K., Crocco, O. S., Mahmud, Q. M., Rehan, M., & Rizvi, L. J. (2023). Connecting concepts: bridging the gap between capacity development and human resource development. *Human Resource Development International*, 26(3), 246–263. <https://doi.org/10.1080/13678868.2022.2108992>
- De Simone, L., Mills, L. F., & Stomberg, B. (2017). Using IRS Data to Identify Income Shifting to Foreign Affiliates. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2477537>
- Devadason, E. S. (2021a). Foreign Labour Policy and Employment in Manufacturing: The Case of Malaysia. *Journal of Contemporary Asia*, 51(3), 398–418. <https://doi.org/10.1080/00472336.2020.1759675>
- Devadason, E. S. (2021b). Foreign Labour Policy and Employment in Manufacturing: The Case of Malaysia. *Journal of Contemporary Asia*, 51(3), 398–418. <https://doi.org/10.1080/00472336.2020.1759675>
- Feld, L. P., Köhler, E. A., Palhuca, L., & Schaltegger, C. A. (2024a). Fiscal federalism and foreign direct investment – An empirical analysis. *The World Economy*, 47(6), 2287–2331. <https://doi.org/10.1111/twec.13547>
- Feld, L. P., Köhler, E. A., Palhuca, L., & Schaltegger, C. A. (2024b). Fiscal federalism and foreign direct investment – An empirical analysis. *The World Economy*, 47(6), 2287–2331. <https://doi.org/10.1111/twec.13547>
- Gao, X., & Wang, Y. (2023). From Investment to the Environment: Exploring the Relationship between the Coordinated Development of Two-Way FDI and Carbon Productivity under Fiscal Decentralization. *Sustainability*, 16(1), 182. <https://doi.org/10.3390/su16010182>

-
- Getachew, E., Woldeamanuel, Y., & Manyazewal, T. (2022). Capacity and Readiness Assessment of Healthcare Facilities for Digital Health Interventions Against Tuberculosis and HIV in Addis Ababa, Ethiopia. *Frontiers in Digital Health*, 4. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2022.821390>
- Gould-Yakovleva, O., & Liu, X. (2024). Mutualism as Mutual Trust: An Ethnographic Case Study on an Elementary-School Teacher-Team Participation in a Science PD Program. *The Qualitative Report*. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2024.6440>
- Hogg-Graham, R., Edwards, K., Ely, T., Mochizuki, M., & Varda, D. (2021). Exploring the capacity of community-based organisations to absorb health system patient referrals for unmet social needs. *Health & Social Care in the Community*, 29(2), 487–495. <https://doi.org/10.1111/hsc.13109>
- Howley, D., Dyson, B., & Baek, S. (2024). Stepping Back, Stepping Up, and Stepping Forward: Exploring One Teacher's Evolving Approach to Teaching Social and Emotional Learning in High School Physical Education. *Journal of Teaching in Physical Education*, 43(2), 362–371. <https://doi.org/10.1123/jtpe.2023-0077>
- Howley, D., Dyson, B., & Baek, S. (2025). All the better for it: Exploring one teacher-researcher's evolving efforts to promote meaningful physical education. *European Physical Education Review*, 31(1), 70–86. <https://doi.org/10.1177/1356336X241247757>
- LAUT, L. T., SUGIHARTI, R. R., & PANJAWA, J. L. (2021). DOES TOURISM SECTOR MATTER IN REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 37(3), 832–837. <https://doi.org/10.30892/gtg.37313-715>
- Mokat, J., Sendouw, R. H. E., Mantiri, J., & Rantung, M. I. R. (2022). Decision-Making of Women Leaders in Government Organizations. *SHS Web of Conferences*, 149, 03008. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214903008>
- Mulyati, Y., & Surtiani, A. (2023). Implementation Of Electronic Parking Terminal (TPE) Policy In The Regional Public Services Agency (Blud) Parking Department Of Transportation In Bandung City. *Sustainability (STPP) Theory, Practice and Policy*, 2(1). <https://doi.org/10.30631/sdgs.v2i1.1303>
- Ndawo, G. (2022). The development of self skills in an authentic learning environment: A qualitative study. *Curationis*, 45(1). <https://doi.org/10.4102/curationis.v45i1.2198>
- Nguyen-Hoang, P., & Zhang, P. (2022). Cap and Gap: The Fiscal Effects of Property Tax Levy Limits in New York. *Education Finance and Policy*, 17(1), 1–26. https://doi.org/10.1162/edfp_a_00327
- Nicolás-Agustín, Á., Jiménez-Jiménez, D., & Maeso-Fernandez, F. (2022). The role of human resource practices in the implementation of digital transformation. *International Journal of Manpower*, 43(2), 395–410. <https://doi.org/10.1108/IJM-03-2021-0176>
- Oyarzo, M., & Paredes, D. (2019). Revisiting the link between resource windfalls and subnational crowding out for local mining economies in Chile. *Resources Policy*, 64, 101523. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101523>
- Pavlov, A., Somerville, T., & Wetzel, J. (2024a). Foreign buyer taxes and housing affordability. *Real Estate Economics*, 52(3), 928–950. <https://doi.org/10.1111/1540-6229.12468>
- Pavlov, A., Somerville, T., & Wetzel, J. (2024b). Foreign buyer taxes and housing affordability. *Real Estate Economics*, 52(3), 928–950. <https://doi.org/10.1111/1540-6229.12468>
- Rahmatul Putra, N., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). THE ROLE OF LOCAL OWN-SOURCE REVENUE IN SUPPORTING FISCAL DECENTRALIZATION AND REGIONAL DEVELOPMENT (Study of Regional Revenue Agency of West Sumatra
-

-
- Province). *Sustainability (STPP) Theory, Practice and Policy*, 3(1), 11–24. <https://doi.org/10.30631/sdgs.v1i1.1813>
- Rantung, M. I. R., Mantiri, J., Pontoh, M. M., & Polii, E. H. (2024). Implementasi Kebijakan Pengawasan Sungai Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa. *Academy of Education Journal*, 15(1), 543–552. <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2251>
- Ruan, M., & Zhao, X. (2022). Fiscal Pressure, Policy Choices and Regional Economic Disparity: Evidence from a Natural Experiment in China. *Sustainability*, 14(19), 12402. <https://doi.org/10.3390/su141912402>
- Sandy, N. T., & Inayati, I. (2022). Transfer of Land and Building Taxes in the Plantation and Forestry Sector in Indonesia in a SWOT Analysis Review. *Jurnal Public Policy*, 8(3), 168. <https://doi.org/10.35308/jpp.v8i3.5484>
- Sen, P. K. (2023). Accuracy of Disclosure Environment and Subsidies for Foreign Investments. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 38(1), 29–51. <https://doi.org/10.1177/0148558X20962900>
- Tang, R. W., & Beer, A. (2022). Regional innovation and the retention of foreign direct investment: a place-based approach. *Regional Studies*, 56(10), 1757–1770. <https://doi.org/10.1080/00343404.2021.2006173>
- Trusova, N. (2019). Development of the Fiscal Consolidation of Local Budgets of Regional Level. *Accounting and Finance*, 1(83), 105–113. [https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1\(83\)-105-113](https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-105-113)
- Van Haelter, B., Vos, D., & Voets, J. (2023). Drivers of reform implementation in local government: a qualitative comparative analysis. *Public Money & Management*, 43(2), 174–182. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1959714>
- Weißmüller, K. S., Ritz, A., & Yerramsetti, S. (2023). Collaborating and co-creating the digital transformation: Empirical evidence on the crucial role of stakeholder demand from Swiss municipalities. *Public Policy and Administration*. <https://doi.org/10.1177/09520767231170100>
- Wen, J., Farooq, U., Tabash, M. I., El Refae, G. A., & Subhani, B. H. (2023). Governance and tax revenue: does foreign aid matter? *International Review of Administrative Sciences*, 89(1), 273–291. <https://doi.org/10.1177/00208523211056071>
- Wu, D., & Dong, W. (2022). Does Local Government's Competitive Behavior to Attract Foreign Investment Affect Ecological Welfare Performance? Evidence from China. *Sustainability*, 14(19), 12903. <https://doi.org/10.3390/su141912903>
- Xu, X., & Dai, M. (2024). Evaluation of Local Government Digital Governance Ability and Sustainable Development: A Case Study of Hunan Province. *Sustainability*, 16(14), 6084. <https://doi.org/10.3390/su16146084>
- Yakob, R. (2020). Context, competencies, and local managerial capacity development: a longitudinal study of HRM implementation at Volvo Car China. *Asian Business & Management*, 19(5), 582–609. <https://doi.org/10.1057/s41291-019-00080-4>
- Yang, Y., & Yee, R. W. Y. (2022). The effect of process digitalization initiative on firm performance: A dynamic capability development perspective. *International Journal of Production Economics*, 254, 108654. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2022.108654>
- Zhou, Y., He, X., & Li, S. (2023). Research on the coordination of fiscal structure and high-quality economic development: An empirical analysis with the example of Anhui province in China. *PLOS ONE*, 18(6), e0287201. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287201>
-